

ABD LATIF

Diplomasi dan Ekspedisi Militer Belanda terhadap Tiga Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan, 1824-1860

RESUME: Pada pertengahan tahun 1824, Belanda tidak puas melihat Bone menjadi satu-satunya pemegang hegemoni politik di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pada Juli 1824, Gubernur Jenderal Belanda, yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta), datang ke Makassar untuk bermusyawarah dengan raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menetapkan struktur politik baru yang sebelumnya telah dirancang secara sepihak oleh Belanda. Dalam rancangan itu, Belanda diletakkan di atas puncak struktur politik, sedangkan Bone dan kerajaan-kerajaan lokal lainnya berada di bawahnya. Kajian ini menggunakan analisis isi terhadap manuskrip lokal yang disebut "lontaraq" dan analisis terhadap beberapa sumber kedua. Kajian ini menemukan bahwa Sidenreng yang terletak di tengah Sulawesi Selatan, Gowa, dan kerajaan-kerajaan yang terletak di selatan Makassar menyetujui rancangan struktur politik, yang diputuskan dalam Kontrak Bungaya yang Diperbaharui pada 27 Agustus 1824. Kontrak Bungaya yang Diperbaharui ini memberi kesempatan kepada Sidenreng, Gowa, dan kerajaan-kerajaan kecil di selatan Makassar untuk menarik diri (merdeka) dari pengaruh politik Bone. Sebaliknya, Raja Bone, Raja Tanete, dan Raja Suppa tidak menyetujui Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, karena kontrak itu berakibat pada berkurangnya pengaruh politik Bone terhadap semua kerajaan lokal di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Diplomasi, Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, struktur politik, diplomasi, ekspedisi militer Belanda, kerajaan lokal, dan Sulawesi Selatan.

ABSTRACT: "The Dutch Diplomacy and Military Expedition against the Three Local Kingdoms in South Sulawesi, 1824-1860". In mid-1824, the Dutch was unhappy to see Bone became the sole political hegemony in South Sulawesi. Therefore, in July 1824, the Governor-General of the Netherlands, located in Batavia (now Jakarta), came to Makassar for consultation with the kings of the South Sulawesi to establish the new political structures that have previously been designed unilaterally by the Dutch. In the draft, the Dutch was placed as top of the political structure, while Bone and other local kingdoms beneath it. This study uses a content analysis of local manuscripts called "lontaraq" and analysis of some secondary sources. This study found that Sidenreng located in the center of South Sulawesi, Gowa, and kingdoms located in the southern Makassar approve the draft of political structure that be decided under the Bungaya Contract which was renewed on August 27, 1824. This revised Bungaya Contract gave an opportunity to Sidenreng, Gowa, and small kingdoms in the south of Makassar to withdraw (free) from the political influence of Bone. Instead, King of Bone, King of Tanete, and King of Suppa did not approve the renewed Bungaya Contract, because the contract resulted in minimising the political influence of Bone to all the local kingdoms in South Sulawesi.

KEY WORD: Diplomacy, renewed Bungaya Contract, political structure, diplomacy, Netherlands military expedition, local kingdom, and South Sulawesi.

PENDAHULUAN

Dalam Perjanjian London, pada 14 Agustus 1814, dinyatakan bahwa Inggris mesti menyerahkan kembali semua negeri jajahan Belanda yang didudukinya, kecuali Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Dalam perjanjian ini juga Belanda dan Inggris

menyetujui tidak akan memberlakukan perdagangan budak di negeri jajahan masing-masing (van der Kemp, 1910:72-79; dan Poelinggomang, 2002:56). Walau bagaimanapun, perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan pada waktu itu, karena Napoleon Bonaparte, yang diasingkan di

About the Author: Dr. Abd Latif adalah Dosen di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UNHAS (Universitas Hasanuddin) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat e-mail: latifunhas@hotmail.com

How to cite this article? Latif, Abd. (2014). "Diplomasi dan Ekspedisi Militer Belanda terhadap Tiga Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan, 1824-1860" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.7(2) November, pp.159-174. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112. Available online also at: <http://www.sosiohumanika-jpssk.com/index.php?lang=en&p=journal&act=viewjurnal2&id=151&postact=detail>

Chronicle of the article: Accepted (May 27, 2014); Revised (August 27, 2014); and Published (November 20, 2014).

Pulau Elba, berhasil melarikan diri dan kembali ke Eropa daratan. Oleh karena itu, Inggris mesti memberi perhatian besar untuk menangkap kembali Napoleon Bonaparte yang senantiasa mengganggu keamanan Inggris di Eropa.

Inggris berhasil menangkap dan mengasingkan kembali Napoleon Bonaparte di Pulau Saint Helena. Peristiwa Napoleon Bonaparte inilah yang menyebabkan serah-terima kekuasaan terhadap Nusantara baru dapat dilaksanakan pada 19 Agustus 1816. Serah-terima kekuasaan itu dilakukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jawa dan Sekitarnya, kepada yang mewakili Gubernur Jenderal Belanda, yaitu Cornelis Theoderus Elout, Gedert Alexander Gerard Philip Baron van der Cepellen, dan Arnold Adriaan Buyskes (Poelinggomang, 2005:205).

Serah-terima kekuasaan terhadap Makassar dan Sekitarnya (*Makassar en Onderhoorigheden*) dilakukan oleh D.M. Dalton, Resident Makassar, kepada Peter Theoderus Chasse. Upacara serah-terima di Makassar pada 7 Oktober 1816 (van de Stuers, 1854:174). Serah-terima kekuasaan dari Inggris kepada Belanda terhadap Sulawesi Selatan tidak didukung oleh tiga kerajaan lokal, yaitu Bone, Suppa, dan Tanete. Penentangan ketiga kerajaan lokal ini dijadikan peluang oleh Sidenreng untuk bersekutu dengan Belanda. Maksud dari Sidenreng bersekutu dengan Belanda adalah semoga Belanda bersedia membantu Sidenreng mempertahankan Parepare bila sewaktu-waktu diserang oleh Suppa, Bone, dan Tanete (*Lontaraq Sidenreng*, t.th.:2).

Di Parepare ini terdapat pelabuhan yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan ke Kalimantan dan Jawa. Pada mulanya, pelabuhan Parepare dibangun dan dikembangkan oleh Bone; tetapi pada tahun 1814, Sidenreng bersekutu dengan Inggris untuk merebut pelabuhan ini. Setelah itu, Inggris meminjamkan pelabuhan Parepare kepada Sidenreng (Kartodirdjo, 1973:278). Cara lainnya yang dilakukan Belanda adalah memerdekakan kerajaan-kerajaan lokal yang dikuasainya dan menjadikan kerajaan-kerajaan itu sebagai sekutu dalam

menghadapi dinamika politik di Sulawesi Selatan (*Lontaraq Sidenreng*, t.th.:3-4).

Walau bagaimanapun, penataan kembali kekuasaan Belanda terhadap Sulawesi Selatan tidak dapat segera dijalankan, karena Bone, Suppa, dan Tanete adalah tiga kerajaan lokal yang tidak mendukung kekuasaan Belanda kembali ditegakkan di Sulawesi Selatan (*cf* Brink, 1884; dan Gibson, 2009). Sikap politik yang tidak bersahabat telah ditunjukkan oleh ketiga kerajaan lokal itu pada masa kedatangan Peter Theoderus Chasse, Gubernur Makassar dan Sekitarnya, bersama Letnan Kolonel Bischeff dan Kapten Dieta yang tiba di Makassar untuk menghadiri upacara serah-terima kekuasaan dari Inggris. Pada waktu itu tidak semua raja lokal datang ke Makassar untuk menghadiri upacara serah-terima kekuasaan. Raja lokal yang hadir adalah Gowa, Sidenreng, Soppeng, dan Konfederasi *Turatea*. Ada pun raja lokal yang tidak hadir adalah Bone, Suppa, Tanete, dan semua kerajaan di Mandar (Leyds, 1940).

Dalam upacara itu, Bone hanya diwakili oleh La Mappaewa Arung Lompu, saudara kandung dari We Manneng Arung Data, Ratu Bone ke-27 (1823-1835), untuk menyampaikan selamat kepada Belanda atas berkuasanya kembali di Sulawesi Selatan. Utusan ini juga menyampaikan usul dari Ratu Bone bahwa Bone akan mendukung kembalinya kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan sekiranya Belanda membagi peran politik kepada Bone dalam mengatur percaturan politik di Sulawesi Selatan. Usulan lainnya dari Ratu Bone ialah Bone mesti menjadi ketua dari persekutuan kerajaan-kerajaan lokal. Salah satu peranannya sebagai ketua persekutuan adalah semua raja lokal yang hendak berjumpa dengan pembesar Belanda di Makassar mesti didampingi oleh Raja Bone (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154).

Selain itu, Ratu Bone juga menuntun agar *Bontoala* dan semua kampung Bugis di Makassar diserahkan kembali kepada Bone. Begitu juga daerah-daerah di utara Makassar sampai Tanete dan daerah-daerah di selatan mulai dari Bulobulo sampai *Turatea* diserahkan kembali kepada Bone. Semua

tuntutan Bone itu tidak setuju oleh Peter Theoderus Chasse, Gubernur Makassar dan Sekitarnya. Bahkan Peter Theoderus Chasse menuntut balik agar Bone menyerahkan kembali semua daerah Belanda yang telah didudukinya selama kekuasaan Inggris. Daerah-daerah itu ialah Maros, Bulobulo, Bulukumba, dan Bantaeng. Peter Theoderus Chasse juga menuntut Tanete agar menyerahkan kembali Segeri, Labbakang, dan Pangkajene kepada Belanda (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154; dan Mattulada, 1998:333).

Berbeda dengan sikap politik kerajaan-kerajaan lokal yang membangkang, maka ada beberapa kerajaan lokal yang menyambut baik kedatangan Belanda di Makassar. Kerajaan-kerajaan lokal itu ialah Gowa, Sidenreng, dan Soppeng. Bahkan dalam upacara serah-terima kekuasaan dari Inggris kepada Belanda itu dihadiri oleh I Manginyarang Karaeng Lembangparang, Raja Gowa ke-30 (1816-1825), bersama beberapa orang bangsawan Gowa yang membawa pengawalnya masing-masing. Rombongan Raja Gowa datang ke Makassar untuk menyampaikan selamat kepada Belanda karena berhasil berkuasa kembali di Sulawesi Selatan (Daeng Patunru, 1993). Dalam upacara itu, Raja Gowa mengumumkan kesetiannya kepada Belanda, sekiranya Belanda mau melantiknya menjadi Raja Gowa (Kadir *et al.*, 1978:52). Sikap politik Gowa yang demikian itu pasti berhubung-kait dengan dinamika politik internal di Gowa, yang senantiasa diganggu oleh gerakan perlawanan dari Karaeng Data (Paeni, 2002:172-184).

La Wawo, Raja Sidenreng ke-16 (1779-1831), juga hadir dalam upacara serah-terima kekuasaan dari Inggris kepada Belanda di Sulawesi Selatan. Dalam upacara itu, Raja Sidenreng menyampaikan selamat dan mengumumkan akan patuh kepada penguasa Belanda di Sulawesi Selatan. Sidenreng segera mengumumkan bersekutu dengan Belanda untuk mendapat bantuan Belanda bila sewaktu-waktu Bone dan sekutu-sekutunya menyerang Parepare, yang pada waktu itu di bawah kekuasaan Sidenreng. Di Parepare ini terletak

pelabuhan yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan ke Kalimantan, Jawa, dan ke dunia Melayu.

Pada tahun 1814, Inggris bersekutu dengan Sidenreng untuk menaklukkan Suppa di Parepare. Setelah itu, Inggris menyerahkan pelabuhan Parepare kepada Sidenreng. Penguasaan Sidenreng terhadap pelabuhan Parepare menyebabkan para pedagang Sidenreng, yang sebelumnya bermarkas di pelabuhan Suppa, kini berpindah ke pelabuhan Parepare (*Lontaraq Addituang Sidenreng*, t.th.:48).

Banyak cara telah dilakukan oleh Belanda untuk memperluas dan memperkuat kembali kekuasaannya di Sulawesi Selatan, namun belum juga berhasil sebagaimana yang diharapkan. Bone dan sekutu-sekutunya tetap membangkang dan tidak mau menjalin persekutuan dengan Belanda. Itulah sebabnya, Kolonel Jan David Van Schelle, Gubernur Makassar dan Sekitarnya (1821-1825), memohon bantuan tentara dan senjata kepada penguasa Belanda di Batavia pada bulan Oktober 1821. Permintaan bantuan ini dimaksudkan untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membangkang. Mayor Jenderal de Kock, Panglima Perang Belanda di Batavia, pada dasarnya dapat memahami maksud dari Kolonel Jan David Van Schelle, tetapi tidak dapat memerintahkan pasukan militer pergi ke Sulawesi Selatan, karena di Jawa pun tentara Belanda harus menghadapi gerakan pembangkangan yang dipimpin oleh pahlawan-pahlawan bumiputera (Kartodirdjo, 1973:34-35).

Situasi di Sulawesi Selatan yang demikian itu menyebabkan Van der Capellen, Gubernur Jenderal Belanda (1816-1825) di Batavia, melantik panitia pada Februari 1824, yang para anggotanya ialah Kolonel Jan David Van Schelle, Gubernur Makassar dan Sekitarnya, dan Johan Hendrik Tobias, yang mewakili pemerintah Belanda di Batavia. Tugas dari panitia adalah melakukan penyelidikan tentang situasi politik di Sulawesi Selatan dan dilaporkan kepada Gubernur Jenderal. Panitia juga mesti memperhatikan untuk menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan

lokal. Tugas lainnya adalah membuat persiapan yang mantap terhadap rencana kunjungan Van der Capellen, Gubernur Jenderal, ke Makassar (*Lontaraq Sidenreng*, t.t.h.:2-3).

Sebelum kunjungan Van der Capellen ke Makassar, maka panitia bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan lokal yang bersekutu untuk membuat sistematika agenda musyawarah bila sewaktu-waktu Gubernur Jenderal tiba di Makassar (Spengler, t.th.). Selain itu, panitia juga mesti membuat laporan penyelidikan yang akan diserahkan kepada Gubernur Jenderal. Untuk membuat laporan ini, maka panitia mengundang semua raja lokal yang bersekutu untuk memusyawarahkan beberapa agenda, yaitu: (1) Bagaimana memastikan tuntutan kerajaan-kerajaan lokal; (2) Membuat rancangan pembagian wilayah kekuasaan antara kerajaan-kerajaan lokal dengan Belanda; (3) Memastikan daerah-daerah di luar wilayah kekuasaan Belanda yang bisa menerima bantuan Belanda untuk membina perdagangan dan pertanian; serta (4) Kebijakan Belanda mesti menjaga keamanan rakyat di daerah-daerah yang memerlukannya (*Lontaraq Sidenreng*, t.th.:3-8).

Pada bulan Mei 1824, panitia dan beberapa raja lokal bermusyawarah di Sidenreng. We Manneng Arung Data, Ratu Bone, dan utusannya tidak hadir dalam musyawarah tersebut, sebab pada waktu itu belum ada kesesuaian faham antara Belanda dengan Bone tentang peran Belanda di Sulawesi Selatan. Raja lokal yang menghadiri musyawarah itu ialah La Wawo, Raja Sidenreng; La Manang Toappamadeng, Raja Wajo ke-36; dan Raja Luwu (*Lontaraq Sidenreng*, t.th.:8-10).

Dalam musyawarah itu, para raja lokal mempersoalkan tentang pelarangan perdagangan ke Maluku. Belanda telah membuat peraturan bahwa kapal yang bisa berlayar ialah kapal yang telah mendapat surat izin dari Belanda. Sementara itu, para pedagang lokal sangat susah memperoleh surat izin berlayar dari Belanda. Inilah beberapa masalah yang menyebabkan banyak pedagang lokal tidak mau bekerjasama dengan penguasa Belanda.

Johan Hendrik Tobias, yang mewakili pemerintah Belanda di Batavia, menjawab masalah ini dengan mengatakan bahwa Belanda akan membatalkan pelarangan berlayar ke Maluku dan peraturan tentang kapal yang bisa berlayar. Ada pun surat izin berlayar akan dimudahkan oleh Belanda, tetapi semua kapal yang hendak berlayar mesti mendapatkan surat izin dari Belanda (Kartodirdjo, 1973:294-297; dan Poelinggomang, 2002:64-65).

Berdasarkan hasil musyawarah di Sidenreng dan laporan panitia kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, maka Van der Capellen berkunjung ke Makassar pada bulan Juli 1824 (*Lontaraq Sidenreng*, t.th.:8-10). Sebelum Gubernur Jenderal tiba di Makassar, maka Johan Hendrik Tobias selaku panitia mengantarkan undangan kepada para raja lokal agar hadir pada musyawarah dengan Gubernur Jenderal di Makassar. Selain mengantarkan surat undangan, Johan Hendrik Tobias juga membuat langkah-langkah diplomasi yang bisa menguntungkan penguasa Belanda di Sulawesi Selatan.

Sebelum Gubernur Jenderal tiba di Makassar, maka Johan Hendrik Tobias pergi ke Parepare dan Sidenreng untuk mengantarkan surat undangan. Johan Hendrik Tobias juga mengutus seseorang untuk mengantarkan surat undangan ke Suppa, tetapi La Tenrilekka, Raja Suppa ke-19 (1824-1862), tidak mau menerima surat undangan itu. Oleh karena itu, setelah bertemu dengan La Wawo, Raja Sidenreng, maka Johan Hendrik Tobias pergi ke Suppa untuk mengantarkan surat undangan. Walaupun Johan Hendrik Tobias secara langsung menemui Raja Suppa, tetapi raja ini tetap menyatakan tidak akan hadir dalam musyawarah dengan Gubernur Jenderal di Makassar (*Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:24-26).

Musyawarah antara Van der Capellen, Gubernur Jenderal Belanda, dengan para raja lokal di Sulawesi Selatan dimulai pada 4 Juli 1824. Para raja lokal yang menghadiri musyawarah ialah Raja Gowa, Raja Sidenreng, Raja Sanrabone, Raja Binamu, Raja Bangkala, dan Raja Laikang. Ada pun para raja lokal yang tidak menghadiri

musyawarah ialah Ratu Bone, Raja Tanete, Raja Suppa, Raja Soppeng, Raja Luwu, dan para raja di Konfederasi Mandar (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154; Leyds, 1940; dan Daeng Patunru, 1989:236).

Musyawarah ini berhasil menyepakati beberapa hal, tetapi gagal menyepakati beberapa hal yang berhubungan-kait dengan penentangan tiga kerajaan lokal, yaitu Bone, Suppa, dan Tanete. Kegagalan ini disebabkan oleh para raja lokal yang menentang dan tidak menyetujui beberapa masalah yang diusulkan oleh Gubernur Jenderal. Setelah musyawarah, Van der Capellen, Gubernur Jenderal Belanda, mengumumkan keputusan yang mesti dijalankan oleh Jan David Van Schelle, Gubernur Makassar dan Sekitarnya. Keputusan itu ialah Belanda mesti membuat ekspedisi penaklukan terhadap Suppa dan Tanete, yang tetap menentang penguasa Belanda di Sulawesi Selatan. Belanda memaksudkan serangan penaklukan terhadap Suppa dan Tanete agar Bone sebagai pelindung kedua kerajaan itu dapat mengubah sikap politiknya, yang senantiasa menentang penguasa Belanda di Sulawesi Selatan (Abduh, 1985:49; dan Daeng Patunru, 1989:239-240).

Dalam musyawarah itu, La Mappaewa Arung Lompu, saudara kandung Ratu Bone, menyampaikan pesan dari Ratu Bone bahwa Bone bisa bersekutu dengan Belanda sekiranya Bone menjadi ketua persekutuan dari kerajaan-kerajaan lokal yang bersekutu dengan Belanda. Sebagai ketua persekutuan, maka semua raja lokal yang hendak bertemu dengan pembesar Belanda mesti diantar atau mendapat surat izin dari Ratu Bone (*Lontaraq Sidenreng*, t.th.:20).

Tuntutan Bone yang demikian itu tidak disetujui oleh Gubernur Jenderal. Pertanyaannya, mengapakah Belanda tidak mau menerima usulan dari Ratu Bone? Ini disebabkan karena luasnya pengaruh politik Bone, mulai pada pertengahan abad ke-17 sampai awal abad ke-19, pasti susah diatur oleh Belanda; manakala posisi Bone dalam hubungan kekuasaan dengan Belanda dipersamakan derajatnya. Ini adalah dasar pemikiran Gubernur Jenderal Belanda dalam

merancang hubungan kuasa antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan lokal. Belanda mesti yang paling di atas dan berperanan sebagai pengawal dari dinamika politik yang akan terjadi, sebagai dampak dari hubungan kuasa antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya dan antara kerajaan lokal dengan pihak penguasa Belanda.

Dasar pemikiran seperti tersebut di atas menyebabkan Van der Capellen, Gubernur Jenderal, membuat surat yang dikirim ke Ratu Bone, yang diantar oleh La Mappaewa Arung Lompu. Dalam surat itu Gubernur Jenderal menyatakan bahwa Belanda memberi kesempatan sampai 15 hari kepada Ratu Bone untuk memikirkan apakah tetap membangkang atau dia mengubah sikap politiknya. Setelah membaca surat itu, maka Ratu Bone pun membuat surat balasan yang akan diantar kepada Gubernur Jenderal. Dalam surat itu Ratu Bone menyatakan sikap politiknya bahwa Bone hanya bersedia bersekutu dengan Belanda, sekiranya peranan politik Bone dan Belanda sama dalam mengatur percaturan politik di Sulawesi Selatan (Mappangara, 1996:105-107).

Dalam sumber lokal dijelaskan bahwa pembangkangan We Manneng Arung Data, Ratu Bone, terhadap penguasa Belanda tidak berhubungan-kait dengan masalah politik, tetapi berhubungan-kait dengan faham tasawuf yang dianutnya, bahwa Belanda adalah kafir, karenanya tidak boleh bekerjasama dengan kaum kafir. Faham tasawuf ini diperoleh dari gurunya yang bernama Syeh Ahmad (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154).

Sampai 15 hari yang telah ditentukan, Bone tidak mengubah sikap politiknya, maka pada 20 Juli 1824, Van der Capellen, Gubernur Jenderal Belanda, bermusyawarah kembali dengan para raja lokal yang bersekutu. Musyawarah ini pun tidak dihadiri oleh We Manneng Arung Data, Ratu Bone; La Tenrilengka, Raja Suppa; dan La Patau, Raja Tanete. Dalam musyawarah itu disetujui untuk mengubah beberapa fasal yang telah diatur dalam Perjanjian Bungaya 1667. Fasal-fasal yang diubah-suai adalah yang berhubungan-kait dengan situasi politik dan ekonomi yang terjadi pada

waktu itu. Fasal-fasal yang dihilangkan ialah fasal tentang pelarangan bagi orang Eropa, selain Belanda, berdagang di Makassar dan fasal tentang pedagang lokal yang mau berdagang ke beberapa pulau di Nusantara. Karena adanya beberapa fasal yang diubah-suai, maka peserta musyawarah menamai perjanjian ini sebagai “Kontrak Bungaya yang Diperbaharui di Ujung Pandang” (*Bongajiasch Kontract te Oedjoeng Pandang Vernleuw*).

Walaupun Ratu Bone tidak menghadiri musyawarah, tetapi Gubernur Jenderal Belanda tetap membuka peluang kepada Ratu Bone untuk menjadi anggota persekutuan. Dalam musyawarah juga disetujui bahwa Raja Gowa dan Ratu Bone akan menjadi anggota persekutuan yang diutamakan. Dalam musyawarah diumumkan bahwa diberi kesempatan dua bulan kepada Bone untuk menyatakan sikap politiknya terhadap statusnya itu dalam persekutuan. Apabila waktu dua bulan berakhir dan Ratu Bone tidak menyatakan setuju dengan statusnya sebagai anggota yang diutamakan dalam persekutuan, maka keanggotaannya dalam persekutuan batal dengan sendirinya (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154).

Musyawarah ditutup dengan resmi pada 27 Agustus 1824, yang ditandai dengan semua anggota persekutuan yang hadir menanda-tangani “Kontrak Bungaya yang Diperbaharui” itu. Para raja lokal yang hadir dan ikut mengesahkan kontrak itu ialah I Mappatunru Karaeng Lembangparang, Raja Gowa ke-30; Raja Tallo; La Wawo, Raja Sidenreng ke-16; Raja Sanrabone; Raja Bangkala; Raja Binamu; dan Raja Laikang. Ada pun para raja lokal yang tidak hadir dan pasti tidak menyetujui kontrak yang diperbaharui itu ialah We Manneng Arung Data, Ratu Bone ke-27; Raja Luwu; Raja Berru; La Patau, Raja Tanete; La Tenrilengka, Raja Suppa; dan para raja lokal di Mandar (*Lontaraq Sidenreng*, t.th.:8-9).

PENAKLUKAN TERHADAP TANETE

Pada awalnya, konflik antara Belanda dengan Tanete disebabkan oleh Tanete yang tidak mau menyerahkan kembali daerah-

daerah yang didudukinya kepada Belanda, yaitu Segeri, Labbakang, dan Pangkajene; walaupun berdasarkan Perjanjian Bungaya 1667, daerah-daerah itu mesti menjadi daerah yang dikuasai oleh Belanda. Pada 4 Juli 1824, Gubernur Jenderal Baron Van der Capellen tiba di Makassar untuk menghadiri musyawarah yang akan dijalankan antara pihak Belanda dengan pihak kerajaan-kerajaan lokal. Musyawarah ini dirancang oleh Belanda untuk membuat kontrak dengan kerajaan-kerajaan lokal tentang bagaimana mengatur kembali percaturan politik di Sulawesi Selatan.

Bersamaan dengan itu, Gubernur Makassar dan Sekitarnya mengantar surat undangan kepada semua raja lokal untuk menghadiri musyawarah yang direncanakan akan diadakan di Makassar. Setelah menerima surat undangan, maka La Patau, Raja Tanete, mengumumkan sikap politiknya bahwa dia tidak akan menghadiri musyawarah yang direncanakan oleh pihak Belanda itu (Gising, 2002:144).

Setelah utusan Belanda kembali ke Makassar, maka La Patau mengundang semua anggota Dewan Hadat dan para pembesar Tanete untuk mengadakan musyawarah dalam menentukan sikap politik terhadap surat undangan Belanda. Dalam musyawarah itu, La Patau menyatakan bahwa dia tidak mau ke Makassar untuk menghadiri musyawarah dengan Belanda. Dia bahkan mengatakan “lebih baik berperang dengan Belanda daripada bermusyawarah dengan Belanda” (Musa, 1990:80; dan Gising, 2002:140).

Musyawarah antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan lokal di Makassar dilaksanakan pada 30 Juli 1824. Dalam musyawarah itu diputuskan bahwa akan bermusyawarah kembali pada bulan Agustus 1824. Oleh karena itu, sebelum musyawarah dilaksanakan, maka Belanda mengutus seseorang untuk mengantar surat undangan kepada La Patau, Raja Tanete, agar mengubah sikap politiknya dalam waktu 15 hari. Belanda sangat berharap kepada La Patau dapat menghadiri musyawarah yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 1824 di Makassar.

Berhubung-kait dengan masalah ini, maka beberapa hari kemudian tibalah di Tanete utusan Belanda yang bernama Ince Sariba dan mengajak La Patau agar mau datang ke Makassar untuk bertemu dengan Gubernur Jenderal. Ince Sariba mengatakan bahwa sekiranya La Patau mau bertemu Gubernur Jenderal di Makassar dan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap diri La Patau, maka nyawa Ince Sariba taruhannya. Apa yang terjadi, La Patau tetap pada sikapnya tidak mau datang ke Makassar untuk menemui Gubernur Jenderal. Oleh karena itu, musyawarah yang dilaksanakan pada Agustus 1824 di Makassar tidak dihadiri oleh La Patau, Raja Tanete; We Manneng Arung Data, Ratu Bone; dan La Tenrilengka, Raja Suppa. Dalam musyawarah itu dibicarakan tentang beberapa fasal dalam Perjanjian Bungaya tahun 1667 yang diubah-suai dengan perkembangan politik dan ekonomi.

Setelah "Kontrak Bungaya yang Diperbaharui" disahkan, maka Belanda pun merencanakan ekspedisi militer untuk menaklukkan dan memaksa Tanete mengesahkan "Kontrak Bungaya yang Diperbaharui" itu. Pada bulan Oktober 1824, beberapa kapal perang Belanda telah tiba di pelabuhan Pancana. Komandan ekspedisi mengutus seseorang untuk menemui La Patau, Raja Tanete, dan memohon Raja Tanete agar mengubah sikap politiknya dan bersedia mengesahkan Kontrak Bungaya yang Diperbaharui. Apa yang terjadi, La Patau tetap pada sikap politiknya dan menyatakan bahwa tuntutan Belanda yang demikian itu adalah penghinaan terhadap Raja Tanete. Tidak adanya peluang mengubah sikap politik La Patau, Raja Tanete, melalui perundingan, maka pada sore harinya pasukan ekspedisi menyerang pusat kerajaan Tanete (Gising, 2002:146-147).

Ekspedisi yang terjadi pada bulan Oktober 1824 itu berhasil mengalahkan pasukan Tanete, yang dipimpin oleh La Patau, Raja Tanete, dan pusat kerajaan Tanete pun diduduki oleh pasukan ekspedisi Belanda. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, maka La Patau memerintahkan pasukannya mengungsi ke

gunung. Sebelum La Patau dan pasukannya mengungsi, maka dia memerintahkan Daeng Manassa untuk menemui Daeng Tanisanga (adik dari La Patau) agar mengambil-alih takhta Kerajaan Tanete dan juga melakukan perundingan dengan komandan ekspedisi Belanda. La Patau juga menegaskan agar Daeng Masabbi, *Kadi* Pancana, dilantik menjadi *Kadi* Tanete, karena hanya *Kadi* Tanete yang bisa mengadakan perundingan dengan komandan ekspedisi Belanda. Petinggi Tanete yang bisa mendampingi Daeng Masabbi, *Kadi* Tanete, dalam mengadakan perundingan itu ialah Daeng Palie, Hakim Tanete (Gising, 2002:146-147).

Daeng Tanisanga, Ratu Tanete yang baru saja dilantik, kemudian mengutus Daeng Masabbi dan Daeng Palie untuk menemui komandan ekspedisi Belanda bahwa dia telah dilantik menjadi Ratu Tanete untuk menggantikan kakaknya, yang telah meninggalkan pusat kerajaan Tanete. Daeng Tanisanga juga mengharapkan Belanda supaya bersedia menghentikan peperangan dan mengadakan perundingan. Para utusan ini juga menyampaikan kepada komandan ekspedisi Belanda bahwa Ratu Tanete yang baru tidak dapat menjumpai komandan ekspedisi.

Semua permohonan itu disetujui oleh komandan ekspedisi Belanda, bahkan komandan ekspedisi berjanji akan menjumpai Ratu Tanete yang baru itu pada sore hari. Pada sore hari, komandan ekspedisi tiba di pusat kerajaan Tanete untuk menemui Daeng Tanisanga, Ratu Tanete. Dalam perjumpaan itu, komandan ekspedisi mengusulkan agar Ratu Tanete datang ke Makassar untuk menemui Gubernur Makassar dan Sekitarnya. Usulan ini disetujui oleh Ratu Tanete dan meminta agar sewaktu-waktu Ince Sariba datang ke Tanete untuk membawanya ke Makassar (Poelinggomang, 2005:113-114).

Setelah Ratu Tanete mengesahkan Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, maka semestinya hubungan politik antara Tanete dengan Belanda dapat terjalin dengan baik. Justeru muncul masalah baru, yaitu Daeng Tanisanga, Ratu Tanete, tidak dapat menghentikan penentangan

kakaknya, yaitu La Patau, yang berhasil menjalin persekutuan dengan We Manneng Arung Data, Ratu Bone, untuk melakukan penentangan kembali terhadap Belanda. Pasukan La Patau bekerjasama dengan pasukan Bone dalam melakukan penyerangan dan menaklukan daerah-daerah di utara Makassar pada bulan November 1824. Setelah menaklukan daerah-daerah di utara Makassar, maka La Patau memimpin pasukannya menyerang kubu pertahanan Belanda di Tanete. Tentera Belanda yang dipimpin oleh Letnan Ulps tidak dapat mempertahankan kubu pertahanan Belanda di Tanete, akhirnya kembali ke Makassar dengan menggunakan kapal *Natilus* (van de Stuers, 1854:180; dan Abduh, 1985:73).

Setelah merebut kubu pertahanan Belanda di Tanete, maka La Patau memutuskan untuk bertahta kembali di Tanete. Belanda tidak senang mendengar La Patau bertahta kembali di Tanete. Oleh karena itu, Belanda pun menyerang La Patau di Tanete pada tahun 1827. Alasan Belanda untuk menyerang La Patau adalah bahwa La Patau melindungi seorang tokoh musuh Belanda, yaitu Petta Ambarala. Serangan Belanda terhadap La Patau tidak berhasil, sebab dalam pertempuran itu La Patau melarikan diri ke Citta. Setelah perang, maka Daeng Tanisanga, Ratu Tanete, mengungsi ke Makassar. Perpindahan ke Makassar ini dimaksudkan agar Belanda tidak memandang Tanete sebagai musuh, juga ingin menunjukkan kepatuhannya kepada Belanda dan bahwa dia tidak terlibat dalam penentangan yang dilakukan oleh La Patau (Poelinggomang, 2005:114).

PENAKLUKAN TERHADAP SUPPA

Setelah pasukan ekspedisi Belanda berhasil memaksa Daeng Tanisanga, Ratu Tanete, mengesahkan Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, maka banyak pasukan ekspedisi kembali ke Makassar pada bulan Oktober 1824. Lebih-kurang 200 orang pasukan ekspedisi singgah di Labbkang dan Pangkajene untuk merebut kedua daerah itu. Sebetulnya, de Stuers, komandan ekspedisi, mau membawa 94 orang pasukan

ekspedisi dan empat kapal perang ke Suppa untuk menaklukan Suppa yang pada masa itu bekerjasama dengan Tenete dan Bone, karena tidak bersedia mengesahkan Kontrak Bungaya yang Diperbaharui. Walau bagaimanapun, penyerangan ke Suppa ditunda, sebab ada surat dari Gubernur Jenderal agar semua pasukan ekspedisi kembali ke Makassar (Morris, 1893b:211).

Suppa, yang batal diserang oleh pasukan ekspedisi Belanda, terletak di sepanjang pantai, dari Sungai Soreang atau Lemo Kapuru di utaranya sampai Sungai Cilallang di selatannya. Wilayah pengaruh politik Suppa bukan hanya meliputi Bacukiki, tetapi juga sampai Palanro, Kupa, Bojo, dan Nepo serta semua kampung yang ada di dalamnya. Dari Tanete, jalan darat ke Suppa mesti berjalan kaki selama 8 jam. Suppa juga terletak di Teluk Parepare, yang mempunyai kedalaman lebih kurang 5 kilometer.

La Tenrilengka, Raja Suppa ke-19, yang tidak mau mengesahkan Kontrak Bungaya yang Diperbaharui itu mendapat bantuan dari tetangganya, yaitu Sawitto, Alitta, Rappang, Langnga, dan Jampue. Pada waktu itu, semua daerah ini berada di bawah pengaruh politik Bone. Banyak tetangganya yang akan membantu sekiranya dilakukan penyerangan ke Suppa, maka Belanda menunda penyerangan terhadap Suppa (van de Stuers, 1854:280; dan Morris, 1893b:210).

Sebetulnya, pada awalnya Alitta mau membantu Sidenreng untuk menyerang Suppa, karena nenek dari We Mappalewa, Ratu Alitta ke-14, yang bernama We Tenriangka adalah saudara sekandung dengan La Wawo, Raja Sidenreng ke-16, yang pada waktu itu bersekutu dengan Belanda dalam menyerang Suppa. Walau bagaimanapun, Dewan Hadat Alitta tidak menyetujui usul We Mappalewa yang mau berpihak kepada Sidenreng. Oleh karena itu, Dewan Hadat Alitta memberhentikan We Mappalewa dan melantik Muhammad Saleh menjadi Raja Alitta ke-15 (*Lontaraq Akkarungeng Alitta*, t.th.:36).

Muhammad Saleh adalah saudara sekandung dengan La Tenrilengka, Raja Suppa ke-19. Pertanyaannya, mengapakah Sawitto mendukung Suppa dan tidak

berpihak kepada Sidenreng? Pada waktu itu, La Cibu Tolebae adalah anak dari La Kuneng, Raja Sawitto ke-16, yang menjadi Panglima Perang Bone dan saudara sekandung dengan La Tenrilengka, Raja Suppa, dan Muhammad Saleh, Raja Alitta. Mengapakah La Cibu Tolebae boleh menjadi Panglima Perang Bone, karena La Cibu Tolebae saudara sekandung dengan We Maddika, ibunda dari We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara, Ratu Bone ke-24 (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:159; *Lontaraq Akkarungeng Sawitto*, t.th.:32; dan *Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:20-21).

Pada bulan Oktober 1824, pasukan ekspedisi Belanda meninggalkan Makassar menuju Suppa. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Buys, yang membawa 208 orang tentara infantri, 20 orang tentara artileri, 5 meriam, 4 kapal pengangkut, satu kapal tongkang dari *Eurydice*, dan dua kapal meriam. Tambahan pula banyak tentara dari Sidenreng yang datang membantu. Bantuan tentara Sidenreng dan tentara lokal lainnya, yang datang melalui darat, tidak terkira jumlahnya (*Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:24; dan *Lontaraq Toloq Rumpaana Suppa*, t.th.).

Pada akhir bulan Oktober 1824, pasukan ekspedisi Belanda yang berasal dari Makassar tiba di Teluk Parepare. Komandan ekspedisi segera mengutus beberapa orang untuk membawa pesan kepada Raja Suppa. Pada malamnya, utusan itu kembali ke kapal bersama dua orang utusan Raja Suppa. Mereka ini menyampaikan pesan dari Raja Suppa kepada komandan ekspedisi bahwa sebaiknya perang ditunda, sebab keputusan berperang atau berdamai mesti diputuskan dalam musyawarah antara Raja Suppa dengan para raja tetangganya, yaitu Sawitto, Alitta, dan Rappang (van de Stuers, 1854:380).

Pada 5 November 1824, sebahagian pasukan ekspedisi Belanda, yang dipimpin oleh Letkol (Letnan Kolonel) Reeder, diturunkan dari kapal untuk membuat kubu pertahanan dan juga melakukan penyelidikan terhadap medan perang. Pada waktu melakukan penyelidikan, tiba-tiba pasukan berkuda Suppa datang dari

arah bukit, menyerang kubu pertahanan Belanda. Serangan yang tiba-tiba ini menyebabkan 5 orang tentera Belanda tewas dan 26 orang terluka. Pertempuran yang mengakibatkan banyak korban di pihak Belanda itu memaksa pasukan ekspedisi memperkuat kubu-kubu pertahanan dengan menggunakan 6 meriam yang diturunkan dari kapal. Tambahan pula lebih-kurang 1,500 tentera lokal yang memperkuat pertahanan di sisi kanan kubu pertahanan Belanda.

Sebelum perang dimulai, komandan ekspedisi Belanda mengutus beberapa orang untuk meminta Raja Suppa menyerah kalah. Ini dilakukan untuk menghindari banyaknya korban, yang diakibatkan apabila perang terjadi. Namun demikian, Raja Suppa tidak mau menyerah sebelum perang terjadi, sebab menyerah sebelum perang adalah tindakan penghinaan terhadap diri sendiri. Jawaban Raja Suppa yang demikian itu menyebabkan pasukan ekspedisi, pada 6 November 1824 malam, meletuskan tembakan meriam ke beberapa kampung. Pada malam itu perang tidak dapat dihindari, pasukan sekutu Suppa menguasai medan perang, khususnya di hutan dan di persawahan. Para pengawal Raja Suppa memerintahkan rakyat supaya segera menggali lubang untuk melindungi para wanita dan anak-anak dari terkena tembakan (*Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:24-25).

Pada 13 November 1824, de Stuers, komandan ekspedisi Belanda, berlayar dari Makassar menuju Suppa dengan menggunakan kapal kecil yang cepat, sehingga pada 14 November 1824, de Stuers tiba di pantai Suppa. Datang juga bergabung ialah La Wawo, Raja Sidenreng, untuk memimpin tentera Sidenreng dalam melakukan penyerangan terhadap Suppa. Pada waktu pasukan ekspedisi mulai mendarat, maka pasukan Suppa dan sekutu-sekutunya menyerang dari kubu-kubu pertahanan mereka yang terbuat dari tanah dan pohon kelapa. Kubu-kubu pertahanan ini susah diserang oleh Belanda, karena di sana-sini terdapat banyak lubang dan hutan.

Pada waktu pasukan ekspedisi Belanda mencoba bergerak maju, maka

satu kumpulan tentara pejalan kaki dan pasukan berkuda muncul dari dalam hutan, yang menyebabkan pasukan ekspedisi merasa terancam. Segera datang pasukan bantuan untuk menghalau tentara pejalan kaki itu dan pasukan berkuda dipukul mundur dengan tembakan mitraliur. Dalam pertempuran ini, 11 orang pasukan ekspedisi terbunuh, termasuk Letnan Marinir Van Pelt, dan 31 orang terluka (*Lontaraq Addituang Sidenreng*, t.th.:48; dan *Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:25-27).

Setelah pertempuran itu, Kapten Buys digantikan oleh de Stuers untuk menjadi komandan ekspedisi Belanda. Dalam hal ini, de Stuers mengatur kembali pasukan ekspedisi, yang pada waktu itu terdapat pasukan utama, ialah 434 orang tentara Eropa dan 115 orang tentara dari Jawa, tapi tidak jelas berapa jumlah tentera lokal yang dipimpin oleh La Wawo, Raja Sidenreng. Pada 25 November 1824, de Stuers memerintahkan Raja Sidenreng untuk memimpin pasukannya bergerak maju dan menduduki kubu pertahanan di sebuah pohon asam yang terletak di Suppa timur. Sekiranya pasukan Sidenreng dapat menguasai kubu pertahanan di pohon asam itu, maka ini akan dapat memukul mundur pasukan Suppa dan menghalangi rakyat Suppa untuk mendapatkan air minum yang terletak di dekat pohon asam itu.

Untuk menguasai kubu pertahanan di pohon asam itu, maka pasukan ekspedisi Belanda melakukan pembakaran di beberapa kampung yang telah dikuasainya. Pertempuran pun tidak dapat dihindari, Suppa bersama sekutunya berperang dengan tanpa mau menyerah. Dalam pertempuran ini pasukan ekspedisi yang terbunuh sebanyak 3 orang dan terluka sebanyak 3 orang. Pasukan Sidenreng yang terbunuh sebanyak 2 orang dan terluka sebanyak 14 orang. Sementara itu pertempuran pada 20 November 1824, tentera Sidenreng yang terbunuh sebanyak 4 orang dan yang terluka sebanyak 12 orang (van de Stuers, 1854:385).

Pada 26 November 1824, La Wawo, Raja Sidenreng, memerintahkan pasukannya yang sebanyak 2,000 orang memasuki hutan

yang terletak di utara Suppa. Pasukan ekspedisi Belanda mengawal dari dua sisi, tetapi Suppa yang didukung sekutu-sekutunya sangat kuat mempertahankan kubu-kubu pertahanan mereka. Dalam pertempuran ini, seorang anak dari Raja Sidenreng terluka kena tembakan. Oleh karena itu, pasukan ekspedisi dan tentara Sidenreng diperintahkan supaya kembali ke kubu pertahanan awal, karena berdasarkan adat lokal apabila ada komandan perang yang terluka atau terbunuh, mesti komandan itu diambil. Sepatutnya, seorang komandan perang tidak boleh jatuh ke tangan musuh, walaupun dia telah menjadi mayat. Dalam perang ini, tentera Sidenreng yang terbunuh sebanyak 30 orang. Tentera Belanda yang terbunuh satu orang dan terluka dua orang (*Lontaraq Addituang Sidenreng*, t.th.:48).

Pasukan ekspedisi Belanda yang senantiasa gagal di setiap medan pertempuran di Suppa menyebabkan de Stuers memutuskan untuk mengembalikan pasukan ekspedisi ke Makassar pada 9 Desember 1824. Pada awal Desember 1824, tentera Belanda di bawah pimpinan Mayjen (Mayor Jenderal) Van Geen, yang didatangkan dari Batavia, tiba di Makassar. Pada awalnya, pasukan ekspedisi pimpinan Van Geen menuju Bone untuk menaklukkan Bone, tetapi pada waktu itu Belanda gagal menaklukkan Bone sebab We Manneng Arung Data, Ratu Bone, sebagai simbol perlawanan Bone, tidak dapat ditangkap oleh Belanda. Gagalnya Belanda di Bone menyebabkan Van Geen tidak puas. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia memerintahkan Van Geen untuk memimpin pasukannya menyerang Suppa.

Pada 23 Juli 1825, Van Geen tiba di Parepare. Tambahan pula, ternyata Sidenreng dengan setianya membantu Belanda untuk menyerang Suppa dari semua arah. Nasib baik bagi Van Geen, karena pertempuran pada waktu itu dapat dimenangkan oleh Belanda. Pada masa perang berlangsung, Sidenreng dengan setianya membantu Belanda (*Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:25).

PENAKLUKAN TERHADAP BONE

Pembatalan terhadap hak-hak istimewa Bone dalam Kontrak Bungaya yang Diperbaharui menjadi pemicu terjadinya penentangan Bone terhadap Belanda (*cf* Caldwell, 1988; dan van der Wal, 2001). We Manneng Arung Data, Ratu Bone, tidak datang ke Makassar untuk menandatangani dan mengesahkan Kontrak Bungaya yang Diperbaharui (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154). Oleh karena itu, Belanda menyusun rencana untuk menyerang Bone. Dalam rencana itu terdapat lebih kurang 1,300 orang tentara Balanda dan 900 orang tentara dari kerajaan-kerajaan lokal yang bersekutu. Tentara bantuan yang berasal dari Sumenep, Madura, sebanyak satu batalion pasukan tombak dan 60 orang pasukan pemanah.

Secara khusus pula, kerajaan-kerajaan lokal yang bersekutu memerintahkan kepada rakyat agar dapat membantu tentara mereka, yaitu Gowa sebanyak 3,200 orang, Bantaeng sebanyak 200 orang, Galesong sebanyak 1,200 orang, dan Binamu serta Bangkala sebanyak 1,500 orang. Oleh karena itu, jumlah pasukan seluruhnya lebih-kurang 7,000 orang. Hanya sebahagian di antara pasukan ini menggunakan senapan. Adapun yang lainnya menggunakan keris, tombak, dan senjata lokal lainnya (Mappangara, 1996:121).

Mengapakah Sidenreng tidak membantu Belanda untuk menyerang Bone? Mungkin karena pada waktu itu, Sidenreng fokus untuk mempertahankan Parepare dan akan membantu Belanda menyerang Suppa yang bertetangga dengan Parepare.

Sebelum melakukan agresi ke Bone, maka pasukan ekspedisi Belanda terlebih dulu mesti menaklukan beberapa kubu pertahanan Bone yang terletak di luar Bone. Mayor Van der Wijk memimpin pertempuran untuk merebut Maros. Pada 5 Februari 1825, Letkol (Letnan Kolonel) Roeder memimpin penaklukan di selatan Makassar. Pada 28 Pebruari 1825, pasukan ekspedisi yang terdiri atas tentara Belanda dan Gowa menyerang Bantaeng dan Bulukumba. Setelah berhasil merebut Bantaeng dan Bulukumba, maka pasukan ini

ditugaskan untuk merebut Kajang dan Sinjai (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154-155). Pada 10 Maret 1825, pasukan ekspedisi tiba di Kajang. Daeng Pahakkang, Raja Kajang, tidak melakukan perlawanan dan memilih cara berdamai, yang penting pasukan ekspedisi tidak mengganggu keselamatan rakyat dan tidak membakar rumah masyarakat (Mattulada, 1998:342).

Setelah Sinjai direbut oleh Belanda, maka terbuka peluang bagi Belanda untuk menyerang pusat kerajaan Bone dari arah selatan. Sebahagian pasukan ekspedisi berangkat melalui darat dan sebahagian yang lainnya berangkat melalui laut. Dalam perjalanan, mereka melalui daerah berawarawa dan menyebabkan mereka banyak yang terkena penyakit malaria. Walaupun demikian, semangat tempur mereka tetap tinggi dan berupaya cepat tiba di dekat Pelabuhan Bajoe yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tempat pendaratan. Pelabuhan Bajoe adalah salah satu pusat pertahanan Bone yang mereka percayai susah untuk direbut oleh Belanda.

Pasukan ekspedisi yang melalui laut ini dipimpin oleh Van Geen, dan tiba di dekat Pelabuhan Bajoe pada 24 Maret 1825. Ada pun pasukan ekspedisi yang melalui darat, berangkat menuju Bone pada 23 Maret 1825 dan tiba di Bone pada esok harinya. Pasukan yang melalui darat ini dibantu oleh tentera Gowa yang dipimpin oleh I Mappatunru Karaeng Lembangparang, Raja Gowa.

Pada waktu tiba di Bone, pasukan ekspedisi tidak segera melakukan penyerangan. Van Geen, sebagai komandan ekspedisi, berpendapat bahwa medan perang di Bone sangat susah dibandingkan dengan medan perang di Sinjai. Oleh karena itu, diutuslah mata-mata untuk melakukan penyelidikan agar mengetahui situasi yang sebenarnya. Van Rijneveld, yang mendapat tugas ini, kemudian melaporkan kepada Van Geen, komandan ekspedisi, bahwa kubu-kubu pertahanan Bone yang ada di sepanjang pantai bukan masalah yang susah untuk direbut. Kubu-kubu pertahanan Bone itu dapat diibaratkan sebagai kubangan kerbau (dalam van de Stuers, 1854:184).

Walaupun tentara Bone berupaya

mempertahankan kubu pertahanan di sepanjang pantai, tetapi karena kekuatan senjata yang mereka gunakan tidak dapat mengimbangi kekuatan senjata yang digunakan oleh Belanda, akhirnya semua kubu pertahanan Bone di sepanjang pantai itu dapat direbut oleh Belanda. Jatuhnya semua kubu pertahanan di sepanjang pantai ke tangan Belanda menyebabkan pasukan ekspedisi dengan mudahnya bergerak maju ke pusat kerajaan Bone.

Tentara Bone yang ditugasi mempertahankan Bajoe dan kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai mengundurkan diri ke pedalaman. Mereka meninggalkan 60 meriam dan puluhan bedil, mesiu, dan senjata lainnya. Semua senjata ini diambil oleh Belanda. Belanda juga merampas beberapa kapal pengangkut milik Bone. Belanda membakar semua kubu pertahanan Bone dan rumah-rumah masyarakat. Pada waktu perang Bajoe berlangsung, terdapat lebih-kurang 200 orang tentara Bone yang terbunuh. Setelah itu Van Geen, komandan ekspedisi, bersama Raja Gowa dengan penuh hati-hati bergerak maju ke pusat kerajaan Bone (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154).

Gerak maju pasukan ekspedisi Belanda tidak dapat dihalangi oleh Bone. Terpaksa tentara Bone mengundurkan diri ke pedalaman dengan menggunakan strategi perang gerilya. Strategi ini tentu menguntungkan bagi Bone, karena tentara Bone pasti sangat tahu situasi medan perang di Bone. We Manneng Arung Data, Ratu Bone, diungsikan ke pedalaman. Itulah sebabnya ketika pasukan ekspedisi merebut pusat Bone, mereka tidak menjumpai Ratu Bone yang telah dibawa oleh tentara Bone ke pedalaman. Pasukan ekspedisi tidak puas karena tidak dapat menangkap Ratu Bone. Belanda pun melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi tentang di manakah keberadaan Ratu Bone pada waktu itu. Laporan dari beberapa pihak mengatakan bahwa Ratu Bone dan Arung Lompu berada di salah satu kampung di Wajo. Ada pun sebahagian petinggi kerajaan berada di sebuah kubu pertahanan di Pasempe (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154).

Pada tahun 1835, We Manneng Arung Data, Ratu Bone, mangkat dengan tanpa putera mahkota (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154-155). Dia digantikan oleh saudaranya yang bernama La Mappasili Arung Panyili (1835-1845). Setelah dilantik menjadi Raja Bone, maka pada tahun 1838, La Mappasili Arung Panyili menyatakan bersedia mengesahkan kontrak dengan Belanda yang dibuat khusus antara Belanda dengan Bone. Sikap politik Raja Bone yang demikian itu sebenarnya adalah upaya diplomatik yang dijalankan oleh La Mappangara Arung Sinri, Menteri Dalam Negeri Bone (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:154).

Pada tahun 1846, La Mappasili Arung Panyili, Raja Bone ke-28, mangkat dengan tanpa putera mahkota. Dia digantikan oleh kemenakannya yang bernama La Parenrengi Arung Pugi menjadi Raja Bone ke-29 (1845-1859). Pada waktu dia dilantik menjadi Raja Bone, maka La Parenrengi Arung Pugi mengangkat sumpah untuk mengukuhkan perjanjian antara Bone dengan Belanda (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:155-157).

Walau bagaimanapun, La Parenrengi Arung Pugi tidak senang apabila ada daerah pengaruh kekuasaan Bone yang diduduki oleh Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1849, Raja Bone memaklumkan perang kepada Belanda. Pernyataan perang kepada Belanda dimaksudkan oleh Bone untuk merebut kembali Maros dan Pangkajene yang sebetulnya adalah keduanya daerah pengaruh kekuasaan Bone, yang pada waktu itu diduduki oleh Belanda (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:157). Perubahan sikap politik Raja Bone yang demikian itu tidak disetujui oleh La Mappangara Arung Sinri, Menteri Dalam Negeri Bone. Oleh karena itu, La Mappangara Arung Sinri pergi ke Makassar untuk meminta perlindungan kepada Belanda. Dia pun bersama para pengawalnya diizinkan oleh Belanda untuk membuka satu perkampungan di Maros (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:157-158).

Pada 16 Februari 1859, La Parenrengi Arung Pugi, Raja Bone, mangkat. Dia digantikan oleh permaisurinya yang bernama We Tenriawaru Pancaitana

Besse Kajuara menjadi Ratu Bone ke-30 (1859-1860). Pelantikan We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara menjadi Ratu Bone menyebabkan Belanda semakin tidak senang melihat dinamika politik di Bone. We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara meneruskan sikap politik suaminya, yang senantiasa menentang penguasa Belanda. Pada pertengahan tahun 1859, terjadi perang antara Bone dengan Belanda. Perang ini diawali oleh Belanda yang menembak semua kapal Bone, yang memasang bendera Belanda secara terbalik. Dalam pertempuran itu, Ratu Bone sendiri yang menjadi panglima perang, dibantu oleh iparnya yang bernama Toaccalo Arung Amali. Sepanjang perang, pasukan Bone tidak hanya terdiri dari tentara lelaki saja, tetapi banyak pula tentara perempuan yang ikut berperang (Abduh, 1985:55).

Untuk menghadapi perang besar dengan Bone, maka Belanda meminta bantuan dari pemerintah pusat di Batavia. Pada bulan November 1859, pasukan ekspedisi diberangkatkan dari Batavia menuju Makassar. Pasukan ekspedisi ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten, yang dibantu oleh Kapten J.G.A. Kempees dan Letnan H.W.L. de Kock. Kekuatan dari pasukan ekspedisi ini adalah pasukan infanteri terdiri atas batalion IV Garnisun Semarang dipimpin oleh Mayor C.M.H. Kroesen. Batalion ini terdiri atas enam kompi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kapten. Batalion XI Garnisun Batavia dipimpin oleh Mayor H.H.J. Jalink. Batalion ini terdiri atas enam kompi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kapten. Batalion Garnisun Makassar dipimpin oleh Mayor H.T. Heisterkamp. Batalion ini terdiri atas tiga kompi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kapten. Pasukan artileri dipimpin oleh Mayor J.F. Van Bloem. Pasukan ini terdiri atas satu kompi meriam lapangan dari Kompi XVIII Garnisun Batavia, satu seksi pasukan *howitzer* dari Garnisun Salatiga, dan satu seksi meriam pegunungan dari Garnisun Makassar. Pasukan kavaleri dipimpin oleh Mayor J. Wolf. Pasukan ini terdiri atas dua kompi dari Garnisun Salatiga, masing-masing

dipimpin oleh seorang Kapten dan satu peleton dari Makassar dipimpin oleh Letnan V.M. Boenge. Pasukan ekspedisi ini dibantu oleh team kesehatan dan satu kompi *Genie Sappeurs* yang dipimpin oleh Walchren. Juga ada penasehat politik (Abduh, 1985:56-57).

Pada 28 November 1859, Belanda berhasil merebut Sinjai. Setelah itu pasukan ekspedisi menuju Bajoe dan berhasil merebut benteng pertahanan Bone di Bajoe pada 6 Desember 1859. Setelah menduduki Bajoe, pasukan ekspedisi dibantu oleh Ahmad Singkeru Rukka bergerak maju ke pusat kerajaan Bone. Pasukan Bone tidak dapat mempertahankan pusat kerajaan Bone, akhirnya membawa Ratu Bone mengungsi ke Pasempe (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:160). Dalam pertempuran di pusat kerajaan Bone, pasukan Belanda yang tertembak mati di antaranya Mayor C.M.H. Kroesen, Letnan A.J. Royen, dan Letnan A. Koenen (Abduh, 1985:57).

Mengapakah Ahmad Singkeru Rukka membantu Belanda untuk menyerang Bone? Sebetulnya, pada waktu La Parenrengi, Raja Bone ke-29, mangkat, maka Ahmad Singkeru Rukka sebagai iparnya memohon kepada Dewan Hadat Bone supaya melantik dirinya menjadi Raja Bone. Walau bagaimanapun, Dewan Hadat Bone telah mengetahui bahwa sepanjang kekuasaan La Parenrengi, maka Ahmad Singkeru Rukka senantiasa berpihak kepada Belanda. Itulah sebabnya, Dewan Hadat Bone melantik We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara untuk menggantikan suaminya atau La Parenrengi (*Lontaraq Akkarungeng Bone*, t.th.:159-160).

Pada 9 Desember 1859, pasukan ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten mengejar We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara, Ratu Bone, ke Pasempe. Sadar bahwa Pasempe kurang aman, maka Ratu Bone bersama pasukannya melarikan diri ke Ajatappareng di kampung Polejiwa. Setibanya di Polejiwa, maka datanglah La Cibu, Raja Sawitto, yang juga Panglima Perang Bone, menjumpai Ratu Bone (Morris, 1893a). La Cibu mengatakan kepada We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara, sebaiknya Ratu Bone tidak tinggal di Polejiwa karena tempat

ini tidak sesuai ditempati oleh Ratu Bone. Silahkan Ratu Bone memilih salah satu di antara tiga negeri untuk ditempati dan berkuasa di sana, yaitu Alitta, Suppa, dan Sawitto. We Tenriawaru Pancaitanya Besse Kajuara pun memilih Suppa, tetapi sebelum pergi ke Suppa dia meminta supaya anaknya yang bernama We Cella dilantik menjadi Ratu Alitta. Setelah itu, We Tenriawaru Pancaitanya Besse Kajuara pergi ke Suppa untuk menggantikan La Tenrilengka, Raja Suppa ke-19 (*Lontaraq Akkarungeng Alitta*, t.th.:37; *Lontaraq Akkarungeng Sawitto*, t.th.:32; dan *Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:26-27).

KESIMPULAN

Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, pada 27 Agustus 1824, bermaksud mengubah struktur politik kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Jikalau sebelumnya, Bone berada di atas puncak struktur politik dan menjadi pengatur dinamika politik di Sulawesi Selatan, maka Kontrak Bunga yang Diperbaharui menempatkan Belanda di atas puncak struktur politik dan meletakkan Bone sederajat dengan kerajaan-kerajaan lokal lainnya.

Struktur politik ciptaan Belanda yang demikian itu menjadi pertanda bahwa kerajaan-kerajaan lokal, terutamanya Bone, Tanete, dan Suppa, tidak memiliki kekuatan diplomasi politik untuk mempertahankan pengaruh politiknya di Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi pertanda bahwa pengaruh politik Bone, sebelum Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, membawa kepada ketidakpuasan kerajaan-kerajaan lokal, terutama Gowa dan Sidenreng, yang segera menyetujui Kontrak Bungaya yang Diperbaharui itu. Sikap politik Sidenreng yang demikian itu menyebabkan Sidenreng senantiasa terlibat dalam membantu Belanda untuk menaklukan semua kerajaan lokal yang masih menentang Belanda.

Kontrak Bungaya yang Diperbaharui pada 27 Agustus 1824, ternyata bukan jalan penyelesaian terbaik bagi Belanda untuk membawa kerajaan-kerajaan lokal ke dalam satu pertuanan politik kepada Belanda. Suppa, Tanete, dan terutamanya Bone, tidak bersedia mengesahkan kontrak

itu, sekiranya kontrak menempatkan semua kerajaan lokal besar dan kecil adalah sederajat dan sama kedudukannya dalam struktur politik. Sikap politik Bone, Suppa, dan Tanete yang demikian itu menyebabkan Belanda, bersama sekutunya, membuat ekspedisi militer untuk menaklukan ketiga kerajaan lokal yang menentang ini. Tanete ditaklukkan pada tahun 1824 dan Suppa dapat ditaklukkan pada tahun 1825, ada pun Bone dapat ditaklukkan pada tahun 1860.

Bibliografi

- Abduh, Muhammad. (1985). *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Brink, P. B. van Standen ten. (1884). *Zuid Celebes*. Utrecht: Kemink & Zoon.
- Caldwell, Ian. (1988). "South Sulawesi a.d. 1300-1600: Ten Bugis Texts". *Tesis Ph.D. Tidak Diterbitkan*. Canberra: ANU [Australian National University].
- Daeng Patunru, Abdurrazak. (1989). *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Daeng Patunru, Abdurrazak. (1993). *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Gibson, Thomas. (2009). *Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik & Kekuasaan Tradisional Makassar, 1300-2000*. Makassar: Penerbit Inninawa, Terjemahan.
- Gising, Basrah. (2002). *Sejarah Kerajaan Tanete*. Makassar: Sama Jaya.
- Kadir, Harun et al. (1978). *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia].
- Kartodirdjo, Sartono. (1973). *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- Leyds, W.J. (1940). "Memori van Overgave: Asisten Resident Mandar". *Arsip Kolonial Belanda* tersimpan di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Jakarta.
- Lontaraq Addituang Sidenreng*. (t.th.). Makassar: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Lontaraq Akkarungeng Alitta*. (t.th.). Makassar: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Lontaraq Akkarungeng Bone*. (t.th.). Makassar: Koleksi Laboratorium Naskah, Fakultas Sastra UNHAS [Universitas Hasanuddin] Makassar.
- Lontaraq Akkarungeng Sawitto*. (t.th.). Makassar: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Lontaraq Akkarungeng Suppa*. (t.th.). Makassar: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Lontaraq Sidenreng*. (t.th.). Makassar: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

- Lontaraq Toloq Rumpaqna Suppa. (t.th.). Makassar: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Mappangara, Suriadi. (1996). "Kerajaan Bone Abad XIX: Konflik Kerajaan Bone – Belanda, 1816 – 1860". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM [Universitas Gadjah Mada].
- Mattulada. (1998). *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Morris, D.F. van Braam. (1893a). "Nota van Toelichting op het Contract Gesloten met het Landschap Sawitto (Adjatapparang) op den 30 October 1890" dalam *TBG (Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap)*, Volume XXXVI.
- Morris, D.F. van Braam. (1893b). "Nota van Toelichting op het Contract Gesloten met het Landschap Soeppa (Adjatapparang)" dalam *TBG (Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap)*, Volume XXXVI.
- Musa, Abd Gaffar. (1990). *Iyanae Poada Adaengngi Attoriolongnge ri Tanete*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Paeni, Mukhlis. (2002). *Batara Gowa: Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poelinggomang, Edward L. (2002). *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poelinggomang, Edward L. (2005). "Sejarah Tanete: Dari Agangnionjo hingga Kabupaten Barru". *Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan*. Sulawesi Selatan: PEMKAB [Pemerintah Kabupaten] Barru.
- Spengler, John Albert. (t.th.). *De Nederlandsche Oost Indische Bezittingen onder het Bestuur van den Gouvernment General G.A.G.P. Baron van der Capellen, 1816-1825*. Utrecht: Kemink en Zoon.
- van der Stuers, H. (1854). "Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes" dalam *TNI [Tijdschrift voor Nederlandsch Indie]*, Volume II.
- van der Kemp, P.H. (1910). *De Terruggave der Oost Indische Kolonien, 1814-1816: Naar Oorspronkeijke Stukken*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- van der Wal, S.L. (2001). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda, 1920-1942*. Jakarta: Penerbit Djambatan, Terjemahan.



Peta Politik di Sulawesi Selatan pada Abad ke-19
(Sumber: www.google.com, 19/9/2014)

Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, pada 27 Agustus 1824, bermaksud mengubah struktur politik kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Jikalau sebelumnya, Bone berada di atas puncak struktur politik dan menjadi pengatur dinamika politik di Sulawesi Selatan, maka Kontrak Bunga yang Diperbaharui menempatkan Belanda di atas puncak struktur politik dan meletakkan Bone sederajat dengan kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Struktur politik ciptaan Belanda yang demikian itu menjadi pertanda bahwa kerajaan-kerajaan lokal, terutamanya Bone, Tanete, dan Suppa, tidak memiliki kekuatan diplomasi politik untuk mempertahankan pengaruh politiknya di Sulawesi Selatan.